



TRANSFORMASI : JURNAL PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

Email: j.transformasi@ummat.ac.id

<http://journal.ummat.ac.id/index.php/transformasi/index>

ISSN: 2797-5940 (Online), ISSN: 2797-7838 (Print)

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram

Jln. KH. Ahmad Dahlan No.1, Pagesangan, Kec. Mataram, Kota Mataram, NTB (83115)

**Peningkatan Literasi Politik Bagi Generasi Muda Muhammadiyah Sebagai
Pemilih Pemula Pada Pemilu Serentak 2024**

*Enhancing Political Literacy Among Young Muhammadiyah Members As First-Time Voters In
The 2024 Simultaneous Elections*

**Yunita Reykasari¹, Dina Merdeka Citraningrum², Dimas Andaru³,
Rayma Artamevia⁴, Mohamad Afrizal⁵, Cahyani Aprilia⁶**

^{1,2,3,4,5,6} Universitas Muhammadiyah Jember

*Email: yunita.reykasari@unmuhjember.ac.id

Abstrak

Literasi politik atau melek politik ialah pengetahuan dan kesadaran akan aspek-aspek substantif elektoral yang penting untuk dikuasai oleh setiap pemilih. Sayangnya, literasi politik seringkali “terabaikan dan gagal ditumbuhkan secara masif sebagai bentuk kesadaran substantif di kalangan pemilih pemula”. Khususnya, bagi generasi muda Muhammadiyah yang akan menjadi pemilih pemula pada gelaran pemilu serentak 2024, literasi politik merupakan hal yang sangat mendesak. Tujuan program ini ialah meningkatkan literasi politik bagi generasi muda Muhammadiyah sebagai pemilih pemula pada pemilu serentak 2024. Sasaran program ini ialah siswa-siswi SMA sederajat kelas XII dan mahasiswa baru di Kabupaten Jember. Metode pelaksanaan program ini ialah gelar wicara literasi politik yang meliputi tema tentang a) urgensi pemilu pada negara demokrasi dan dampak pilihan pada kehidupan bangsa dan negara; b) memilih pemimpin yang kompeten dalam konteks pemilu; c) dampak politik transaksional; dan d) bahaya penyebaran konten-konten negatif pada media sosial terkait pemilu. Dari hasil evaluasi diketahui bahwa setelah pelaksanaan program ini terjadi peningkatan kemampuan literasi politik dari para peserta sebanyak 55,70%, yang sebelumnya 19,27% meningkat menjadi 74,97%.

Kata Kunci: Generasi Muda Muhammadiyah; Literasi Politik; Pemilih Pemula; Pemilu Serentak 2024

Abstract

Political literacy refers to the knowledge and awareness of key electoral aspects that every voter needs to understand. Unfortunately, political literacy is often "neglected and fails to be widely promoted as substantive awareness among first-time voters." This issue is particularly urgent for the young generation of Muhammadiyah, who will be first-time voters in the 2024 simultaneous elections. The aim of this program is to enhance political literacy for Muhammadiyah's youth as first-time voters in the 2024 elections. The target audience includes 12th-grade high school students and new university students in Jember Regency. The program will be conducted through a political literacy talk show, addressing topics such as: a) the importance of elections in a democracy and the impact of voter choices on the nation; b) selecting competent leaders in elections; c) the effects of transactional politics; and d) the dangers of spreading negative content on social media related to elections. Evaluation results showed a significant increase in participants' political literacy, from 19.27% to 74.97%, representing a 55.70% improvement after the program.

Keywords: Muhammadiyah Youth; Political Literacy; First-Time Voters; 2024 Simultaneous Indonesian Elections

Submitted: 23-06-2024, Revision: 23-07-2024, Accepted: 03-08-2024

PENDAHULUAN

Pada tahun 2024, Indonesia akan menyelenggarakan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak yang diprediksi menjadi tahun politik terbesar dalam sejarah Pemilu di Indonesia. Pemilu yang akan diselenggarakan Februari 2024 itu mencakup pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota dewan perwakilan rakyat (DPR) RI, dewan perwakilan daerah (DPD) RI, dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) provinsi dan kabupaten/kota. Di samping itu, diselenggarakan juga Pilkada pada November 2024 yang terdiri dari pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota di seluruh Indonesia (Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2022; Farisa, 2022).

Beberapa survey memprediksi bahwa generasi milenial dan generasi Z akan menjadi kelompok pemilih dengan proporsi terbesar di pemilu 2024 (Mulyana, 2021). Pemilih muda atau pemilih milenial merupakan pemilih dengan rentang usia 17-37 tahun. Prediksi itu juga menyebutkan bahwa jumlah pemilih muda akan mengalami peningkatan pada gelaran pemilu 2024. Jika dilihat pada data dari KPU tentang pemilu serentak 2019, jumlah pemilih muda sudah mencapai kisaran 80 juta jiwa dari 193 juta pemilih. Hal ini menunjukkan bahwa 35%-40% pemilih muda sudah memiliki kekuatan dan pengaruh besar terhadap hasil pemilu yang juga akan berdampak terhadap kemajuan bangsa. Salah satu kekhawatiran yang muncul ialah bahwa para pemilih muda berpeluang menjadi penyumbang “golput” terbesar dalam pemilu 2024 (Sekretariat Dewan DPRD Kota Yogyakarta, 2022).

Kemungkinan besar, pemilih dari kalangan generasi muda merupakan pemilih pemula (*first-time voters*). Mereka merupakan warga negara yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan telah memenuhi syarat sebagai pemilih, yang untuk pertama kalinya menggunakan hak pilih pada suatu pemilihan umum (pemilu nasional atau pilkada). Berdasarkan definisi ini, cakupan warga negara yang dapat menjadi pemilih pemula bisa luas dan beragam. Selain potensinya terdiri dari kalangan pelajar dan mahasiswa yang berada dalam rentang usia antara 17-22 tahun (dihitung berdasarkan pelaksanaan pemilu 5 tahunan), juga termasuk kalangan muda yang berada dalam rentang usia tersebut; warga negara yang sudah/pernah menikah meski usianya belum mencapai 17 tahun, dan para pensiunan TNI/Polri. Dalam tulisan ini, yang dimaksud pemilih pemula dibatasi pada kalangan pelajar SMA sederajat dan mahasiswa

baru yang untuk pertama kalinya menunaikan hak pilihnya dalam suatu pemilu, baik pemilu nasional maupun daerah.

Selain golput, permasalahan lain yang perlu diwaspadai ialah bahwa pemilih pemula umumnya merupakan pemilih yang irrasional. Pemilih irrasional yaitu dapat digambarkan secara sederhana sebagai pemilih yang bukan saja kurang memiliki pengetahuan dan kesadaran elektoral, tetapi juga terbelenggu dari berbagai bentuk intimidasi; kurang memiliki daya tahan terhadap rayuan transaksional yang tidak sehat dan melanggar aturan seperti politik uang; serta kurang memahami arti penting suara yang mereka miliki dan konsekuensi politik dari pilihannya di masa-masa yang akan datang (Sutisna, 2017).

Serangkaian program dan kegiatan untuk meningkatkan partisipasi aktif pemilih pemula dalam menggunakan hak politiknya telah banyak dilakukan oleh berbagai lembaga atau organisasi seperti KPU, Bawaslu, dan Perguruan-perguruan tinggi. Sutisna (2017) menyatakan bahwa;

“Secara umum sosialisasi pemilu hanya berhasil meningkatkan pengetahuan dan kesadaran teknis elektoral seperti kapan, dimana dan bagaimana cara memberikan suara pada hari dan tanggal pemungutan suara dilakukan. Sementara aspek-aspek substantif elektoral seperti arti penting setiap suara yang diberikan; pentingnya membangun otonomi dan kemandirian politik; dampak buruk dari praktik-praktik transaksi politik yang tidak sehat seperti money politics; dan dampak atau konsekuensi pilihan politik di kemudian hari, cenderung terabaikan dan gagal ditumbuhkan secara masif sebagai bentuk kesadaran substantif di kalangan pemilih pemula.”

Penguasaan aspek-aspek substantif elektoral seperti yang dikemukakan pada kutipan di atas dapat disebut sebagai “literasi politik” atau “melek politik”. Karim et al. (2015) menjelaskan bahwa literasi politik (political literacy) merupakan pemahaman akan proses dan isu-isu politik yang menjadikan setiap warga negara mampu menjalankan perannya sebagai warga negara. Definisi lainnya ialah Putri (2015) yang menyatakan bahwa literasi politik merupakan internalisasi tentang konsep-konsep (pengetahuan) politik yang diambil dari kehidupan sehari-hari seperti perbincangan politik, media massa, tingkah laku politikus dan sebagainya yang akan mempengaruhi keterampilan dan sikap diri sendiri mereka dan orang lain terhadap apa itu politik. Secara sederhana, Sutisna (2017) mendefinisikan bahwa literasi politik pada dasarnya

merupakan senyawa yang utuh dari pengetahuan (kognisi), keterampilan (psikomotor) dan sikap (afeksi).

Literasi politik merupakan hal mendesak bagi para pemilih pemula. Sebagaimana disebutkan di atas umumnya mereka merupakan pemilih irrasional. Menurut Karim et al. (2015), ini disebabkan oleh tiga alasan utama. Pertama, pemilih irrasional beresiko tinggi terhadap berbagai propaganda politik yang digalakkan oleh golongan-golongan antidemokrasi. Kedua, sikap irrasional pemilih memunculkan budaya politik yang menyimpang seperti menjual hak pilihnya (Qodir, 2017). Ketiga, sikap irrasional pemilih dapat menyebabkan politik pemerintahan (daily governing dan policymaking) jauh dari kepentingan publik. Selain itu, Sutisna (2017) menambahkan bahwa kurangnya literasi politik di kalangan pemilih pemula dapat menyuburkan apatisme politik (sikap tak acuh, tidak peduli), bahkan hingga level sinisme terhadap politik.

Dari uraian-uraian di atas, dilaksanakanlah program Pengabdian Kepada Masyarakat yang fokus sekaligus judulnya ialah “Peningkatan literasi Politik Bagi Generasi Muda Muhammadiyah sebagai pemilih pemula pada pemilu serentak 2024 di Kabupaten Jember”. Seperti yang terlihat dalam judul, sasaran program ini ialah Generasi Muda Muhammadiyah di Kabupaten Jember. Dua alasan utama pemilihannya ialah, a) generasi muda Muhammadiyah akan menjadi pemilih pemula pada pemilu serentak 2024, dan b) jumlah pemilih pemula di Kabupaten Jember hampir 20% dari keseluruhan pemilih (diolah dari BPS Kabupaten Jember, 2021). Tujuan program ini ialah meningkatkan literasi Politik Bagi Generasi Muda Muhammadiyah sebagai pemilih pemula pada pemilu serentak 2024 di Kabupaten Jember. Melalui program ini diharapkan generasi muda Muhammadiyah sebagai calon pemilih pada Pilpres 2024 mau dan mampu menggunakan hak pilihnya secara cerdas demi kemajuan bangsa dan negara Indonesia sebagaimana amanah Persyarikatan (Aanardianto, 2022; Kaha 2019).

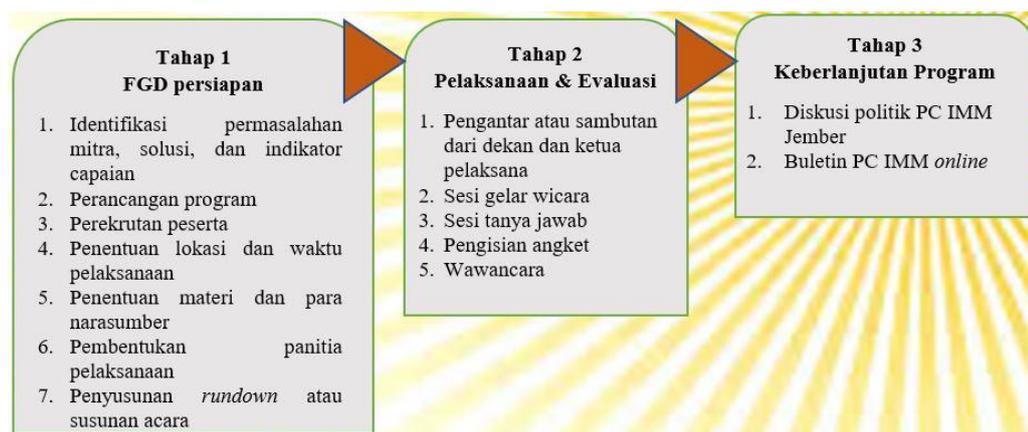
METODE

Sasaran program ini ialah generasi muda Muhammadiyah yang akan menjadi pemilih pemula pada gelaran pemilu dan Pilkada serentak di tahun 2024. Untuk itu tim pengabdian memilih PC IMM Jember sebagai mitra dalam program ini. Dalam program ini, PC IMM Jember akan berpartisipasi sebagai a) perekrut peserta, b) perancangan program, c) panitia pelaksana; dan d) salah satu narasumber.

Peserta program ini ialah 30 orang dengan karakteristik a) siswa-siswi kelas XII SMA sederajat dan Mahasiswa aktif di Kabupaten Jember; b) aktif di organisasi Muhammadiyah dari berbagai tingkatan/ortom; c) usia kurang dari 20 tahun; dan d) belum pernah menjadi pemilih baik dalam Pemilu maupun Pilkada.

Lokasi pelaksanaan pengabdian ini ialah Aula Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember. Waktu pelaksanaannya ialah hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024 pukul 08.00 – 12.00 WIB.

Tahapan kegiatan program ini digambarkan dalam bagan sebagai berikut.



Gambar 1. Tahapan pelaksanaan program pengabdian.

Berdasar FGD persiapan, dipilih gelar wicara sebagai metode pelaksanaan kegiatan. Alasannya ialah untuk menghindari kesan terlalu formal, sehingga para peserta tertarik untuk menyampaikan pendapat-pendapatnya mengenai politik terkini kepada para narasumber

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pengabdian terdiri dari hasil secara kuantitatif maupun kualitatif dari kegiatan yang dilaksanakan. Jika ada tabel/bagan/gambar berisi paparan hasil yang sudah bermakna dan mudah dipahami maknanya secara cepat. Tabel/bagan/gambar tidak berisi data mentah yang masih dapat atau harus diolah.

Seperti tampak pada gambar 1 di atas tahap pertama ialah FGD persiapan yang terdiri dari 7 pokok bahasan. Namun demikian, hanya poin 1 dan 5 yang akan dijelaskan pada bagian ini. Dari FGD ini dihasilkan rumusan permasalahan mitra, solusi yang ditawarkan, serta indikator capaian sebagai berikut.

Tabel 1. Rumusan Permasalahan mitra, Solusi, dan Indikator Capaian

No	Permasalahan	Solusi	Indikator capaian
1	Kurangnya kesadaran generasi muda Muhammadiyah terhadap Urgensi Pemilu dalam negara demokrasi	Edukasi urgensi pemilu pada negara demokrasi dan dampak pilihan pada kehidupan bangsa dan negara	peningkatan kesadaran peserta program terhadap urgensi pemilu dalam negara demokrasi
2	Kurangnya keterampilan generasi muda Muhammadiyah terhadap preferensi calon pemimpin negara/ daerah	Edukasi identifikasi preferensi pemimpin yang kompeten dalam konteks pemilu	peningkatan ketrampilan dalam mengidentifikasi preferensi pemimpin yang kompeten dalam konteks pemilu
3	Kurangnya kesadaran generasi muda Muhammadiyah terhadap bahaya politik transaksional	Edukasi tentang politik transaksional dan dampaknya	peningkatan kesadaran bahaya politik transaksional
4	Kurangnya kesadaran generasi muda Muhammadiyah terhadap bahaya penyebaran konten-konten negatif pada media massa dan sosial terkait pemilu serentak	Edukasi tentang bahaya penyebaran konten-konten negatif pada media massa dan sosial terkait pemilu serentak	peningkatan kesadaran tentang bahaya penyebaran konten-konten negatif pada media sosial terkait pemilu serentak

Aspek literasi politik itu sangatlah luas. Oleh karena itu, dari referensi-referensi dan diskusi yang kami lakukan, aspek-aspek literasi politik yang diedukasikan dibatasi pada empat hal yang dianggap mendesak sebagai berikut.

1. Urgensi pemilu pada negara demokrasi dan dampak pilihan pada kehidupan bangsa dan negara sebagai mana dijelaskan oleh Sarbaini (2014)
2. Memilih pemimpin yang kompeten dalam konteks pemilu sebagaimana dijelaskan oleh Prayuda & Rahman (2020)
3. Dampak politik transaksional sebagaimana dijelaskan oleh Ibadurrahman (2021)

4. Konten-konten negatif pada media massa dan sosial terkait pemilu serentak sebagaimana dijelaskan oleh Juditha (2021).

Susunan acara pada tahap pelaksanaan terdiri dari pembukaan atau seremonial, sesi gelar wicara, sesi tanya jawab, evaluasi dan penutup. Pada sesi pembukaan Dekan Fakultas Hukum menyampaikan sambutannya yang berisi tentang urgensi sejarah pemilu di Indonesia bagi pemilih pemula. Beliau menegaskan bahwa pemahaman akan sejarah pemilu menjadi landasan penting dalam membentuk kesadaran politik yang matang dan bertanggung jawab. Melalui pengetahuan tentang perjalanan demokrasi di Indonesia, pemilih pemula dapat lebih memahami nilai-nilai penting seperti kebebasan, partisipasi, dan akuntabilitas dalam proses pemilihan umum. Dengan demikian, mereka akan mampu membuat keputusan yang lebih cerdas dan berdasarkan informasi yang akurat saat memilih pemimpin serta partai politik dalam pesta demokrasi. Dekan juga menekankan bahwa pemahaman akan sejarah pemilu dapat membantu pemilih pemula menghindari pengaruh dari politik uang dan kampanye negatif, serta memperkuat komitmen mereka dalam menjaga integritas dan kualitas demokrasi di masa depan.

Sesi berikutnya ialah gelar bicara yang dipandu oleh Silviana Tri Agustin, anggota PC IMM Jember Komisariat Justisia. Empat narasumber secara berurutan menyampaikan materi sebagaimana yang telah ditentukan dalam FGD di atas. Narasumber pertama menyampaikan bahwa urgensi pemilu pada negara demokrasi seperti di Indonesia sangat penting untuk memastikan legitimasi pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam proses politik. Pemilu memberikan kesempatan kepada warga negara untuk memilih pemimpin yang akan mewakili aspirasi dan kepentingan mereka. Selain itu, pemilu juga berfungsi sebagai mekanisme kontrol terhadap kekuasaan, mencegah terjadinya otoritarianisme, dan memastikan akuntabilitas pejabat publik.

Narasumber kedua membicarakan tentang karakteristik pemimpin menurut perspektif Al-Islam Kemuhammadiyah. Menurutnya seorang pemimpin negara haruslah memiliki kriteria-kriteria sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah 247, Yusuf 22, Al-Anbiya 79, dan Al-Qashash 26. Jika kriteria-kriteria ini terpenuhi maka tujuan *baladun toyyibatun warobbun ghofur* akan lebih mudah tercapai.



Gambar 2. Penyampaian Materi Oleh Narasumber Ke-2 Abu Bakar Zakin (Mahasiswa PC IMM Jember)

Narasumber ketiga menyampaikan tentang dampak politik transaksional. Menurutnya, pemilu terdiri dari tahapan kampanye, pemilihan, penghitungan, penetapan di MK dan pelantikan. Titik krusial terjadinya politik transaksional ialah pada tahap kampanye. Pada tahap ini akan dijumpai berbagai peristiwa politik transaksional yang berupa pemberian-pemberian dalam bentuk uang, sembako, fasilitas, dan lain-lainnya oleh aktor-aktor seperti politisi, pengusaha, selebgram, influencer, dan tokoh-tokoh berpengaruh. Sasaran yang rentan terhadap politik transaksional ini ialah perempuan dan pemilih pemula. Dampaknya ialah kebijakan-kebijakan yang akan dibuat hanya akan menguntungkan kepentingan pribadi atau salah satu golongan saja.



Gambar 2. Penyampaian Materi Oleh Narasumber Ke-3 Ahmad Suryono, M.H. (Kaprodi Ilmu Hukum Unmuh Jember)

Narasumber keempat membahas tentang konten-konten negatif pada media massa dan sosial selama pemilu. Pembahasan meliputi pengertian konten-konten negatif, jenis-jenisnya, cara dan siklus penyebarannya, ancaman hukum, bahaya yang ditimbulkan, serta kiat-kiat untuk mengidentifikasi hoaks pemilu. Di akhir ceramahnya, narasumber menekankan bahwa hoaks dan konten negatif lainnya adalah bagian dari kehidupan demokrasi yang perlu diwaspadai dan dicegah penyebarannya. Jika dibiarkan, hal ini dapat menimbulkan sikap apatis dan sinis terhadap politik, terutama di kalangan pemilih pemula.

Sesi selanjutnya ialah tanya jawab. Tercatat 6 pertanyaan yang disampaikan oleh para peserta kepada para narasumber. Salah satu pertanyaan yang dianggap penting untuk disampaikan dalam tulisan ini ialah terkait politik transaksional. Ikkal salah satu peserta menyampaikan bahwa penolakan dan pelaporan terhadap praktik bagi-bagi amplop pada saat pemilu akan mengakibatkan pengucilan ataupun gunjingan oleh para pemilih lain yang menerimanya. Lalu pertanyaannya ialah, bagaimanakah sikap kita terhadap praktik politik uang yang marak terjadi pada fase kampanye?

Narasumber kedua menjawab bahwa berdasarkan perspektif hukum, penerima politik uang yang menerima hanya untuk dirinya sendiri atau tidak untuk disalurkan kepada yang lain tidak bisa dipidanakan. Meskipun demikian, perlu diyakini bahwa politik uang pasti merugikan. Praktik politik uang menciptakan siklus korupsi dan kolusi, di mana para pelaku yang berhasil menjadi pejabat publik akan berusaha untuk minimal mengembalikan modal dan mempertahankan kekuasaan mereka dengan menghalalkan berbagai cara. Akibatnya, pembangunan ekonomi terhambat, kualitas pelayanan pemerintahan menurun, dan masalah lingkungan serta sosial semakin parah. Sebagai contoh, kasus korupsi alih fungsi hutan menjadi lahan sawit pada tahun 2014 yang menjerat mantan gubernur Riau, Annas Maamun, menyebabkan deforestasi 140 hektar yang merusak ekosistem dan menyumbang pemanasan global. Selain itu, pembukaan lahan sawit memunculkan masalah sosial lain seperti perbudakan di area perkebunan. Dengan kata lain, para penerima politik uang secara tidak langsung ikut terlibat dalam kerusakan lingkungan dan masalah sosial yang timbul dari keputusan-keputusan yang korup.

Sesi berikutnya adalah penutup yang diisi dengan rangkuman dan evaluasi. Rangkuman dari gelar wicara ini ialah bahwa literasi politik merupakan hal yang sangat penting untuk diketahui setiap warga negara untuk menggunakan hak politiknya secara

cerdas. Hal-hal yang mendasar menyangkut literasi politik itu mencakup urgensi pemilu dalam negara demokrasi, memilih pemimpin-pemimpin negara atau daerah yang kompeten berdasar perspektif Al Islam Kemuhammadiyah, dampak dan bahaya politik transaksional, serta bahaya penyebaran konten-konten negatif pemilu pada media sosial.

Untuk evaluasi dilakukan dengan cara wawancara dan pengisian angket. Akrom, salah satu peserta yang diwawancarai, menyampaikan bahwa kegiatan ini sangat bermanfaat khususnya bagi dirinya yang baru pertama kali ini dalam menghadapi gelaran pemilu serentak di tahun 2024 ini. Sebelumnya, dia berpikir bahwa politik itu kotor dan pemilu itu tidak penting bagi dirinya sehingga ia merencanakan golput. Namun, setelah kegiatan ini, ia memastikan akan menggunakan hak pilihnya secara cerdas dan mengajak rekan-rekan seusiaanya untuk tidak golput demi kemajuan bangsa dan negara. Adapun hasil dari pengisian angket dirangkum dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 2. Rangkuman Evaluasi-Angket

No	Komponen Evaluasi Literasi Politik	Rata-rata Sebelum Pelaksanaan	Rata-rata Sesudah Pelaksanaan
1	kesadaran peserta program terhadap urgensi pemilu dalam negara demokrasi	15.31%	63.32%
2	ketrampilan dalam mengidentifikasi preferensi pemimpin yang kompeten	14.42%	71.54%
3	kesadaran bahaya politik transaksional	19.52%	78.12%
4	kesadaran tentang bahaya penyebaran konten-konten negatif pada media sosial terkait pemilu serentak	27.81%	86.88%
Rata-rata		19.27%	74.97%

Keterangan pesentase:

0-20 sangat kurang

51-75 cukup menguasai

21- 50 kurang

76-100 sangat menguasai

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa rata-rata penguasaan literasi politik para peserta sebelum pelaksanaan ialah 19,27% dan meningkat menjadi 74,97% setelah pelaksanaan. Hal ini mengindikasikan bahwa terjadi peningkatan sebanyak 55,70%.

Sebagai keberlanjutan program, PC IMM Jember direkomendasikan untuk menyelenggarakan diskusi politik dua bulanan yang diharapkan menghasilkan gagasan atau opini tentang isu-isu politik terkini. Gagasan ataupun opini tersebut diupayakan untuk dapat dituangkan dalam bentuk artikel-artikel ataupun konten-konten kreatif lainnya yang nantinya akan dipublikasikan melalui buletin online atau media sosial. Melalui cara ini, diharapkan generasi muda Muhammadiyah mampu berkontribusi dalam kehidupan demokrasi yang sehat, yang membutuhkan beragam pandangan dan pendapat. Artikel dan opini politik memberikan platform untuk berbagai suara dan perspektif, memperkaya diskusi publik dan membantu menemukan solusi yang lebih baik untuk masalah-masalah yang dihadapi bangsa.

SIMPULAN

Berdasar evaluasi yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pelaksanaan program ini telah tercapai. Hal ini diketahui dari evaluasi dalam bentuk angket dan wawancara. Dari hasil angket diketahui bahwa setelah pelaksanaan program ini terjadi peningkatan kemampuan literasi politik dari para peserta sebanyak 55,70%, yang sebelumnya 19,27% meningkat menjadi 74,97%. Kemampuan literasi ini mencakup a) kesadaran peserta program terhadap urgensi pemilu dalam negara demokrasi sebanyak 63.32% dari yang sebelumnya 15.31%; b) ketrampilan dalam mengidentifikasi preferensi pemimpin yang kompeten sebanyak 71.54 % dari yang sebelumnya 14.42%; c) kesadaran bahaya politik transaksional sebanyak 78.12% dari yang sebelumnya 19.52%; dan d) kesadaran tentang bahaya penyebaran konten-konten negatif pada sosial terkait pemilu serentak sebanyak 86.88% dari yang sebelumnya 27.81%. Adapun dari wawancara diketahui bahwa para peserta berkomitmen untuk tidak golput, tidak asal-asalan dalam menggunakan hak pilih, menolak politik uang, dan menolak penyebaran hoaks.

Sebagai keberlanjutan, PC IMM Jember disarankan untuk menyelenggarakan pelatihan menulis dan konten kreatif agar ide dan gagasan politik generasi muda Muhammadiyah dapat dituangkan dalam artikel atau konten kreatif yang kemudian dapat dipublikasikan di berbagai platform media massa atau sosial. Pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan keterampilan generasi muda dalam mengungkapkan

pandangan politik mereka secara efektif dan menarik, serta memperkaya diskusi publik dengan perspektif baru dan beragam.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami tim pengabdian ini menghaturkan terima kasih sebesar-besarnya pada Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah (Hibah Riset Muhammadiyah Batch VII 2023); LPPM Universitas Muhammadiyah Jember, PC IMM Jember, BEM Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember, dan semua pihak terkait yang tidak bisa kami sebutkan satu per satu atas semua bantuan baik berupa dana, tempat, tenaga maupun gagasannya, sehingga kegiatan program pengabdian yang telah kami lakukan dapat berjalan dengan baik, lancar, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aanardianto. (2022, January 3). Pemilu Serentak 2024, Wilayah Muhammadiyah ini Dorong Kadernya Ambil Peran Politik. Muhammadiyah. <https://muhammadiyah.or.id/pemilu-serentak-2024-wilayah-muhammadiyah-ini-dorong-kadernya-ambil-peran-politik/>
- BPS Kabupaten Jember. (2021, November 8). Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Jember, 2020. <https://jemberkab.bps.go.id/statictable/2021/11/08/318/jumlah-penduduk-menurut-kelompok-umur-di-kabupaten-jember-2020.html>
- Farisa, F. C. (2022, June 2). Pemilu dan Pilkada Serentak 2024: Alasan, Urgensi, dan Tantangan. Kompas. <https://nasional.kompas.com/read/2022/06/02/14514481/pemilu-dan-pilkada-serentak-2024-alasan-urgensi-dan-tantangan?page=all>
- Ibadurrahman, I. (2021). Implementasi dan Dampak Politik Transaksional (Mahar Politik) Dalam Pilkada Terhadap Pembangunan di Daerah. *Lex Renaissance*, 6(4), Article 4. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss4.art9>
- Juditha, C. (2021, March 9). Buzzer di Media Sosial pada Pilkada dan Pemilu Indonesia. Seminar Nasional Komunikasi dan Informatika, Article 0. <https://jurnal.kominfo.go.id/index.php/snki/article/view/2557>
- Kaha, K. (2019, January 7). Pemuda Muhammadiyah ajak pemilih pemula gunakan hak pilih. Antara News. <https://pemilu.antaranews.com/berita/784747/pemuda-muhammadiyah-ajak-pemilih-pemula-gunakan-hak-pilih>

- Karim, A. G., Edi, A. C., Rahmawati, D., & Widaswati, R. (2015). Memahami Tingkat Melek Politik Warga di Kabupaten Sleman [Hasil FGD]. Tim Peneliti JPP Fisipol UGM dan KPU.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2022). Jadwal Pemilu 2024 Sudah Ditetapkan, Presiden Pastikan Tak Ada Penundaan. <https://www.kominfo.go.id/content/detail/41113/jadwal-pemilu-2024-sudah-ditetapkan-presiden-pastikan-tak-ada-penundaan/0/berita>
- Mulyana, C. (2021, October 12). Pemilih di Pemilu 2024 Didominasi Milenial, NasDem Gencarkan Edukasi Politik. <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/439516/pemilih-di-pemilu-2024-didominasi-milenial-nasdem-gencarkan-edukasi-politik>
- Prayuda, R., & Rahman, K. (2020). Pemilihan Umum di Indonesia: Pemimpin dan Wakil Rakyat Yang Ideal. *JURNAL KEMUNTING*, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.0506/jkg.v1i2.134>
- Putri, N. E. (2015). Peningkatan Literasi Politik Melalui Kebijakan Berbasis Gender Di Kabupaten Solok. *Kafa`ah: Journal of Gender Studies*, 5(1), Article 1.
- Qodir, Z. (2017). Politik Uang Dalam Pemilu-Pemilukada 2014: Modus dan Resolusinya. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 8(2). <https://ejournal.ipdn.ac.id/JAPD/article/view/82>
- Sarbaini, S. (2014). Demokratisasi dan Kebebasan Memilih Warga Negara dalam Pemilihan Umum. *INOVATIF | Jurnal Ilmu Hukum*, 7(3), Article 3. <https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/2177>
- Sekretariat Dewan DPRD Kota Yogyakarta. (2022, June 23). Pemilih Pemula Dalam Pemilu. Sekretariat Dewan DPRD Kota Yogyakarta. <https://setwan.jogjakota.go.id/detail/index/21959>
- Sutisna, A. (2017). Strategi Peningkatan Literasi Politik Pemilih Pemula Melalui Pendekatan Pembelajaran Kontekstual. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 6(2), Article 2. <https://doi.org/10.23887/jish-undiksha.v6i2.11771>